



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM TAHUN 2019



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggung jawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Walikota Batam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Batam.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam dalam mengelola pendidikan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2016 – 2021.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kota Batam dan dapat dijadikan landasan bagi kesinambungan/kebijakan program dalam pembangunan Pendidikan Selanjutnya.

Batam, Januari 2020
Kepala Dinas Pendidikan Kota
Batam



HENDRI ARULAN, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19670719 199103 1 009

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas pokok dan fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Visi dan Misi	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Perencanaan	9
B. Rencana Strategis	10
C. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN	16
A. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan	18
B. Analisis Capaian Kinerja	26
C. Realisasi Anggaran	30
D. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	32
BAB IV PENUTUP	43
A. Tinjauan Umum	43
B. Tinjauan Khusus	44
C. Saran dan Tindak Lanjut	44
LAMPIRAN	



Daftar Tabel

Tabel 1.1. Jumlah Sekolah di Kota Batam.....	4
Tabel 1.2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Non PNS	5
Tabel 1.3. Tingkat Pendidikan Pejabat Eselon Dinas Pendidikan Kota Batam	5
Tabel 1.4. Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 1.5. Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian	6
Tabel 1.6. Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Setiap Satuan Pendidikan	7
Tabel 1.7. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas	7
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama	10
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	11
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan	46
Tabel 3.2. Realisasi Sasaran Perluasan Akses Pendidikan Dasar	52
Tabel 3.3. Realisasi Sasaran Mutu Layanan Pendidikan	57
Tabel 3.4. Realisasi Sasaran Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan	58
Tabel 3.5. Realisasi Sasaran Kualitas Sumber daya masyarakat	59
Tabel 3.6. Realisasi Sasaran Peran Serta Masyarakat Terhadap Pendidikan	61
Tabel 3.7. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2019	63
Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019	64
Tabel 3.9. Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2019	65
Tabel 3.10. Realisasi Belanja Modal 2019	70



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Laporan ini diawali dengan perumusan perencanaan strategis, penetapan indikator kinerja, pengukuran serta ditindak lanjuti dengan penyusunan LKjIP.

1. *Perencanaan Strategis (Renstra)*

Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Kota Batam yang ditetapkan dalam tahun 2016-2021 ini menjadi acuan dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam renstra meliputi :

- Pernyataan tentang Visi dan Misi.
- Faktor-faktor penentu keberhasilan.
- Penetapan Tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Perumusan Renstra ini merupakan jawaban atas perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting.

Sesuai Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun untuk tahun 2019 terdapat 4 sasaran, 6 Program dan 101 Kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan APBD DPA SKPD tahun 2019 yang tersedia sebesar Rp. 616.491.019.706,56.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (self assesment), dari 4 sasaran yang telah ditetapkan seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kinerja 100%,

namun masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

2. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Pendidikan Kota Batam ditetapkan berdasarkan rumusan Renstra yang dijabarkan dari Visi dan Misi Dinas Pendidikan, sedangkan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2019, sehingga pengukuran kinerja secara keseluruhan dapat dilakukan secara utuh.

Evaluasi Kinerja yang digunakan disajikan pada lampiran berdasarkan formulasi indikator kinerja yang telah dirumuskan. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh adanya faktor-faktor penunjang antara lain :

Pendanaan yang memadai, tenaga yang cukup, sarana dan prasarana serta dukungan lintas dinas dan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat.

3. Rencana dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2019 sebesar Rp. 616.491.019.706,56 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 584.067.938.437,13 atau (94,74%). Adapun jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp. 310.472.382.489,58 dengan realisasi sebesar Rp. 300.247.255.671,00 (96,71%) sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp. 304.504.637.216,98 terealisasi sebesar Rp. 280.820.682.766 (93,21%).



Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Terselenggaranya Goodgovernance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagaimana dimaklumi untuk mencapai Program Pembangunan Daerah yang merupakan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk didalamnya pengelolaan di bidang pendidikan, dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan taraf hidup masyarakat, sehingga berdampak terhadap capaian IPM di Kota Batam.

Keberadaan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dalam rangka mewujudkan misi keempat Pemerintah Kota Batam, yakni Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ yang didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Menjawab tanggung jawab yang diberikan, maka Dinas Pendidikan Kota Batam telah menetapkan 5 (lima) Kebijakan Umum dan Anggaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam, yakni :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah;
3. Memberikan Bantuan Pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bentuk bantuan pendidikan lainnya bagi peningkatan sumber daya masyarakat;



Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam disiasati dengan membebaskan sebagian pembangunan melalui APBN Bidang Pendidikan yang dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai Tugas dan Fungsinya

2. Fungsi

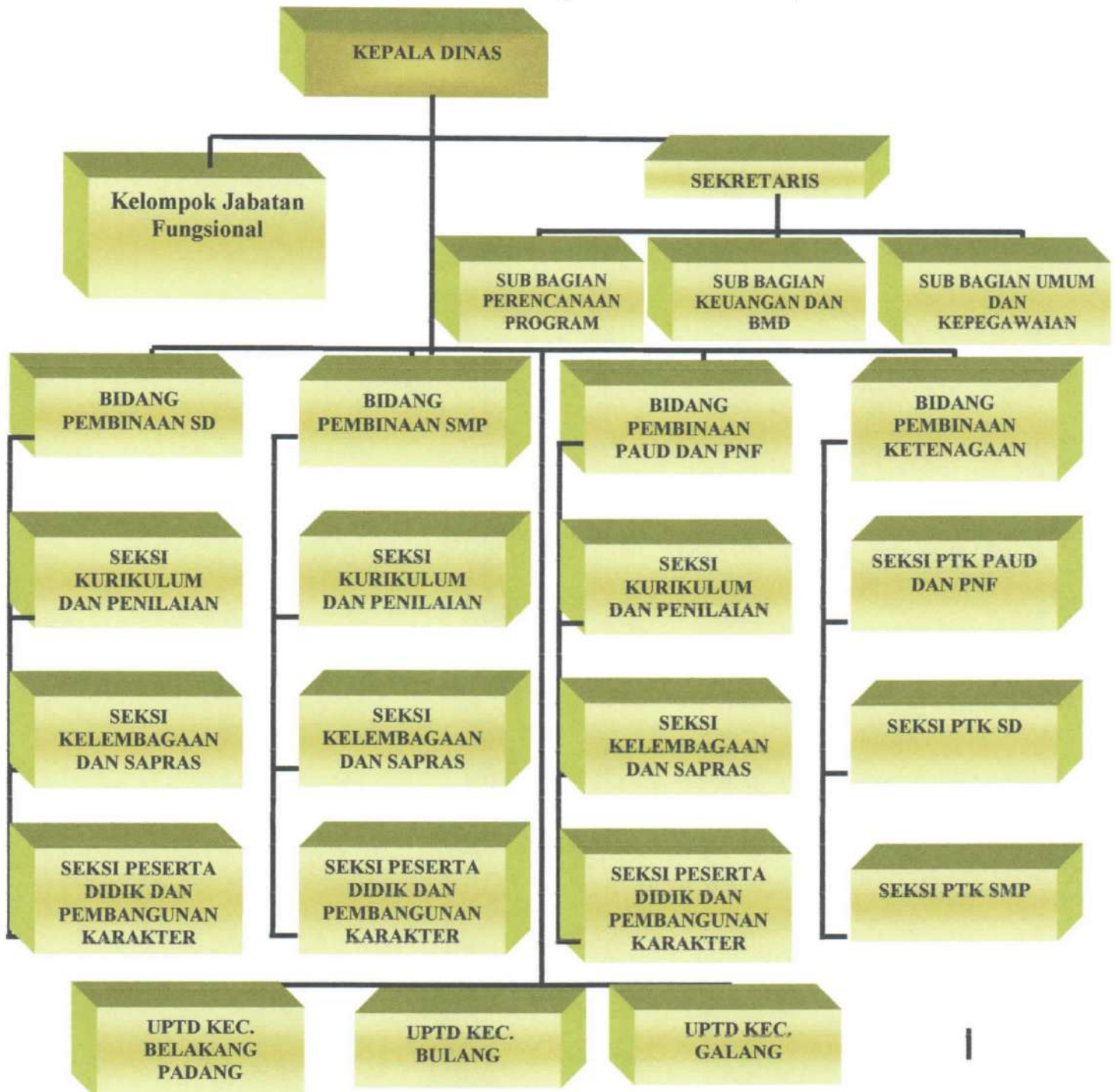
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi SKPD antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan pembinaan ketenagaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan pembinaan ketenagaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan pembinaan ketenagaan; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Pelaksanaan tugas sesuai dengan struktur yang ada masih dipandang kurang efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh penjuru Kota Batam khususnya masyarakat yang berada di daerah Hinterland. Sehingga pada akhirnya dilakukan penambahan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Daerah yang secara garis lurus berada dibawah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibagi dalam beberapa unit, yang terdiri antara lain :

1. Unit Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Galang
2. Unit Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Bulang
3. Unit Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Belakang Padang

Selain ketiga unit tersebut, Dinas Pendidikan Kota Batam juga menaungi sekolah-sekolah yang berada di Kota Batam. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa jumlah sekolah di Dinas Pendidikan adalah sebagaimana dijelaskan pada tabulasi berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Sekolah di Kota Batam

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah Berdasarkan Status Sekolah	
		Negeri	Swasta
1.	Taman Kanak-Kanak/RA	19/0	583/122
2.	Sekolah Dasar/MI	145/2	222/33
3.	Sekolah Menengah Pertama/MTs	63/2	105/18

Sumber Data : Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa

Jumlah Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Batam (tidak termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar) sampai dengan Bulan Desember 2019 sebanyak : 97 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada: Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP, Bidang Pembinaan Ketenagaan serta 3 UPT cabang Dinas (Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan).



Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Non PNS

No.	Uraian	Jumlah	
		PNS	NON PNS
1.	Golongan I	0	-
2.	Golongan II	8	-
3.	Golongan III	33	-
4.	Golongan IV	12	-
5.	Non PNS	-	39
Jumlah			53
Jumlah Keseluruhan			

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pejabat Eselon Dinas Pendidikan Kota Batam

NO	URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JML.
		SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3	
I	STRUKTURAL								
	a. Eselon II	-	-	-	-	1	-	-	1
	b. Eselon III	-	-	-	-	2	2	1	5
	c. Eselon IV	-	-	-	-	8	7		15
	JUMLAH	-	-	-	-	11	10	-	21

Tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam berjumlah 10.210 orang. Dilihat dari status kepegawaiannya sebanyak 69.74% dari jumlah tersebut merupakan tenaga pendidik (guru) non PNS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

**Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan							Total
		<=SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	TK	0	500	16	37	1.209	11	1	1.774
2	SD	400	17	92	152	5.872	143	0	6.676
3	SMP	102	7	8	48	1.521	73	1	1.760
Total			539	525	118	289	10.708	339	2

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

Tabel:1.5

Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian

No	Jenjang	Status PNS dan NON PNS		Total
		PNS	NON PNS	
1	TK	33	91	124
2	SD	1300	1455	2755
3	SMP	703	568	1271
Total		2036	2114	4150

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

1. Keadaan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Setiap Satuan Pendidikan

Penduduk Usia Sekolah		Keadaan Siswa	
Usia	Jumlah	Satuan Pendidikan	Jumlah
Usia 4-6 Tahun	65.500	TK/PAUD/RA	15.377
Usia 7-12 Tahun	131.931	SD/MI	138.413
Usia 13-15 Tahun	55.132	SMP/MTS	57.813

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

2. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Tabel 1.7
Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Ruang Kelas			
		Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sdg/Brk
TK/PAUD	373	1.360	1.327	33	0
SD	367	3.873	1.998	181	0
MI	35	252	184	58	10
SMP	166	1.397	777	571	49
MTs	20	138	100	31	7
JUMLAH	961	7.020	4.386	874	59

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

Pembangunan pendidikan menuju Pendidikan Indonesia 2018 direncanakan tidak ada lagi penduduk yang tidak bersekolah di tingkat pendidikan dasar, dengan demikian akan terwujud derajat pendidikan masyarakat yang optimal, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai dengan penduduknya hidup dalam lingkungan yang kondusif dan dengan perilaku yang rasional dalam kehidupan sosial, serta memiliki kemampuan berperilaku positif, adil dan merata serta memiliki derajat pendidikan sesuai

amanat Undang-Undang Republik Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan bidang pendidikan diperlukan perencanaan strategik agar arah pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan fokus sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

D. VISI DAN MISI

1. Pernyataan Visi Dinas Pendidikan Kota Batam

Visi Pembangunan Pendidikan Kota Batam melalui Perencanaan Strategi 2016 – 2021 adalah :

***"TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA,
BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING,***

"

2. Pernyataan Misi

Dalam upaya pencapaian visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk dokumen RPJMD, maka selanjutnya Dinas Pendidikan membuat dokumen Renstra dengan mencantumkan visi yang memiliki benang merah dari visi dan misi kepala daerah. Setelah visi tersebut ditetapkan selanjutnya disusun misi untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan tersebut.

Misi Dinas Pendidikan Kota Batam terdiri dari :

- a. Mencerdaskan Sumber Daya Manusia yang kreatif , inovatif , dan Kompetitif;
- b. Meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang bermutu dan merata;
- c. Meningkatkan Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang berintegritas;
- d. Meningkatkan Kesetaraan layanan pendidikan dalam keterlibatan pelaku pendidikan;
- e. Mewujudkan penguatan tata kelola yang dinamis, kreatif ,inovatif dan Akuntabel;



Bab 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. PERENCANAAN

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi OPD yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Batam, maka perlu disusun suatu rencana kerja dan indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan strategi organisasi yang tepat. Indikator Kinerja Utama disusun dan ditetapkan oleh Kepala OPD untuk selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan OPD dalam menjalankan rencananya guna mencapai dan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Salah satu permasalahan Pendidikan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Batam adalah pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, mutu dan relevansi, dan manajemen pendidikan khususnya pendidikan Dasar. Penekanan akan pentingnya pembangunan pendidikan, dibutuhkan karena semua pihak meyakini bahwa pembangunan di masa mendatang disamping tetap bertumpu pada pembangunan ekonomi, akan bertumpu pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam Pola dasar Pembangunan Kota Batam, ditegaskan bahwa titik berat pembangunan bidang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga masyarakat atau stakeholder pendidikan.



1. Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Batam menetapkan suatu indikator kinerja utama yang menjadi pedoman dalam menentukan keberhasilan suatu SKPD :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD
2	Mutu Layanan Pendidikan	Persentase sekolah PAUD berakreditasi minimal B
		Persentase SD berakreditasi minimal B
		Persentase SMP berakreditasi minimal B
3	Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisen
4	Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan	Tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat

B. Rencana Strategis (RENSTRA)

Sesuai dengan dokumen RPJMD, maka tujuan yang ingin diwujudkan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah **Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa**. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai berikut :



Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	T1	Kualitas Pendidikan	Peringkat Hasil Ujian Sekolah SD Se Provinsi Kepulauan Riau						1
			Peringkat Hasil Ujian Nasional SMP Se Provinsi Kepulauan Riau						1
	S.1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	77,6	79,26	80,44	82,22	84,69	86,22
	S.2	Mutu Layanan Pendidikan	Persentase sekolah berakreditasi minimal B						
			PAUD	36,46	41,35	45	48	53	60
			SD	53,58	56	61	64	67	70
			SMP	64,59	67	69	71	74	78
	S.3	Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisen	100	100	100	100	100	100
	S.4	Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan	Tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100



C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan di capai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan di wujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan di wujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelola nya. Manfaat dari perjanjian kinerja bagi pimpinan instansi adalah memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Tahun 2019 terdapat 4 sasaran strategis yang di wujudkan dinas pendidikan kota batam. Keempat sasaran tersebut terdiri atas urusan wajib pendidikan. target yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan di wujudkan melalui berbagai program dan kegiatan dinas pendidikan kota batam tahun 2020.

Berikut adalah perjanjian kinerja dinas pendidikan kota batam:





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRI ARULAN**

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak *pertama*.

Nama : **MUHAMMAD RUDI**

Jabatan : Walikota Batam

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak *kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
WALIKOTA BATAM

Batam, Januari 2020
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

HENDRI ARULAN
Pembina Tk. I
NIP. 19670719 199103 1 009



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	84,69
2	Mutu Layanan Pendidikan	Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B :	
		PAUD	53,00
		SD	67,00
		SMP	74,00
3	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien	100
4	Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan	Tersedianya bantuan pendidikan yang efektif kepada masyarakat	100

Program:	Anggaran:	Kegiatan:
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 227.353.634.160,26	73 Kegiatan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 444.182.000,00	2 Kegiatan
3. Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Rp 59.662.517.021,50	18 Kegiatan
4. Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	Rp 4.654.068.000,00	4 Kegiatan
5. Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Kependidikan	Rp 667.726.100,00	2 Kegiatan



Program:	Anggaran:	Kegiatan:
6. Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif	Rp 3.872.654.000,00	2 Kegiatan
	Rp.296.654.751.281,76	101 Kegiatan

Pihak Kedua,
WALIKOTA BATAM

Batam, Januari 2020
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

HENDRI ARULAN
Pembina Tk. I
NIP. 19670719 199103 1 009



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan

Penetapan kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja disemua jenjang pada Dinas Pendidikan, telah ditetapkan target kinerja yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan Khususnya pada tahun 2019. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja diperlukan suatu informasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan tersebut. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atau atas sasaran/target kinerja seperti tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2019. Akuntabilitas kinerja dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data dan analisisnya, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja, pertanggung jawaban dimaksudkan dalam rangka transparansi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus dijadikan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan perencanaan dengan pelaksanaan melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi pemerintahan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang dibuat sesuai ketentuan yang



diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2019, Dinas Pendidikan Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disusun dan disajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan capaian kinerja yang telah ditetapkan

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN

Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, apabila masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau efisien. Karena itu kualitas pelayanan sangat penting dan seharusnya selalu fokus pada kepuasan pelanggan. Bagi instansi pemerintahan khususnya Dinas Pendidikan sebagai instansi yang memberikan pelayanan pada layanan pendidikan harus memiliki ukuran keberhasilan menjalankan program dan kegiatan dalam bentuk Kinerja. Kinerja menunjukkan ukuran yang dijadikan dasar untuk mengukur dan menilai sejauh mana program dan kegiatan dapat terealisasi dalam periode kerja yang ditargetkan. Indikator kinerja program menyangkut hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan sementara indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait langsung dengan indikator program. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai tentu dapat diukur dengan capaian tahun sebelumnya berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan, target dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi landasan bagi semua pelaksana program dan kegiatan untuk tetap fokus dan konsisten dalam komitmen yang dibangun untuk tercapainya kinerja yang maksimal. Berdasarkan renstra dan renja dinas Pendidikan telah ditetapkan indikator kinerja Utama (IKU) antara lain:

1. Persentase APK PAUD
2. Persentase sekolah PAUD berakreditasi minimal B
3. Persentase sekolah SD berakreditasi minimal B
4. Persentase sekolah SMP berakreditasi minimal B
5. Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien
6. Tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat



Capaian kinerja Dinas Pendidikan di tahun 2019 merupakan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2019 dan telah dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran selama satu tahun. Berdasarkan Renstra dan Renja dinas pendidikan terdapat satu tujuan yang hendak dicapai. Dalam pencapaian tujuan telah ditetapkan beberapa sasaran dengan rincian 3 sasaran untuk tujuan satu dan 2 sasaran untuk tujuan dua. Dari hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018 capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Target Kinerja Dinas Pendidikan

TUJUAN DAN SARAN			INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019	
				TARGET	CAPAIAN
T1	Kualitas Pendidikan		Peringkat Hasil Ujian Sekolah SD Se Provinsi Kepulauan Riau	1	1
			Peringkat Ujian Nasional SMP Se Provinsi Kepulauan Riau	1	1
S1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini		APK PAUD	84,69	95,55
S.1.1	Meningkatkan Minat Orang tua untuk mendaftarkan anak ke lembaga PAUD		Meningkatnya Persentase anak yang mendaftarkan ke lembaga PAUD	19,59	21,32
	S.1.1.1	Sosialisasi Pendidikan PAUD melalui Pembinaan pendidikan anak usia dini terintegrasi	Terlaksananya sosialisasi minat orang tua mendaftarkan anak ke lembaga PAUD (12 Kecamatan)	100	100
	S.1.2	Ketersedian Sarana Pendidikan PAUD	Jumlah peningkatan daya tampung TK pada satuan pendidikan negeri	1164	1220
	S.1.2.1	Terbangunnya GSB TK	Jumlah GSB TKN yang dibangun	1	1



	S.1.2.1	Terbangunnya RKB TK	Jumlah RKB TKN yang dibangun	4	0
S2	Mutu Layanan Pendidikan		Persentase sekolah berakreditasi minimal B		
			PAUD	48,00	44,85
			SD	64,00	68,00
			SMP	71,00	71,02
	S.2.1	Pembinaan dan Pengembangan PAUD	Jumlah lembaga PAUD	531	602
	S.2.1.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum PAUD	Persentase guru yang mengikuti pelatihan K 13	86,00	87,00
	S.2.1.2	Kondisi layak guna Sarana dan prasarana PAUD	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	80,00	80,00
	S.2.1.3	Peningkatan kecakapan motorik peserta didik PAUD	Persentase peserta didik yang mengikuti kegiatan kreasi anak PAUD	90,00	90,00
	S.2.1.4	Bangunan PAUD yang laik guna	Sekolah PAUD Bangunan Kondisi Baik	95,55	96,00
	S.2.2	Peningkatan status rapor mutu SD	Jumlah sekolah menuju kategori minimal SNP 3	291	297
	S.2.2.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum SD	Persentase guru yang mengikuti pelatihan K 13	82,50	85,00
			Pelaksanaan ujian sekolah SD	ada	Ada
	S.2.2.2	Peningkatan kualitas lulusan SD	Rata-rata nilai Ujian Sekolah SD	70,50	68,50



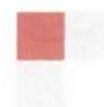
			Angka Putus Sekolah SD	0	0,03
	S.2.2.3	Bangunan SD laik guna	Sekolah pendidikan SD bangunan kondisi baik	95,22	96,25
	S.2.2.4	Kondisi laik guna Sarana dan prasarana SD	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	72,00	73,00
	S.2.2.5	Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik Siswa SD	Jumlah perolehan prestasi akedemik minimal tingkat provinsi	3	3
			Jumlah perolehan prestasi non akedemik minimal tingkat provinsi (dari 28 nomor lomba)	24	24
S.2.3	Perluasan Akses Pendidikan Dasar SD		APK SD/MI/Paket A	104,8	104,91
			APM SD/MI/Paket A	93,8	96,00
	S.2.3.1	Terbangunnya GSB SD	Jumlah GSB SDN yang dibangun	2	1
	S.2.3.2	Terbangunnya RKB SD	Jumlah RKB SDN yang dibangun	45	44
S.2.4	Peningkatan status rapor mutu SMP		Jumlah sekolah menuju kategori minimal SNP 3	129	133
	S.2.4.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum SMP	Persentase guru yang telah mengikuti pelatihan K 13	84,80	85,00
			Pelaksanaan Ujian Nasional SMP	Ada	Ada
	S.2.4.2	Peningkatan kualitas lulusan SMP	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP	56,25	58,95



			Angka Putus Sekolah SMP	0	0,03
	S.2.4.3	Bangunan SMP laik guna	Sekolah pendidikan SMP bangunan kondisi baik	94,72	96,66
	S.2.4.4	Kondisi layak guna Sarana dan prasarana SMP	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	71,30	73,00
	S.2.4.5	Peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa SMP	Jumlah perolehan prestasi akedemik minimal tingkat provinsi	3	3
			Jumlah perolehan prestasi non akedemik minimal tingkat provinsi (dari 28 nomor lomba)	28	28
S.2.5	Perluasan Akses Pendidikan Dasar SMP		APK SMP/MTs/Paket B	106,15	105,91
			APM SMP/MTs/PAket B	91,92	92,22
	S.2.5.1	Terbangunnya GSB SMP	Jumlah GSB SMPN yang dibangun	0	2
	S.2.5.2	Terbangunnya RKB SMP	Jumlah RKB SMPN yang dibangun	10	40
S.2.6	Mutu tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, SD dan SMP		Persentase Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD, SD dan SMP berstandar SKM/Sertifikasi	22,72	26,50
			Persentase Meningkatnya Kepala sekolah negeri yang memiliki sertifikat kepala sekolah	90,70	92,00
	S.2.6.1	Peningkatan Guru PAUD bersertifikasi	Persentase Guru PAUD bersertifikasi pendidik	12,86	24,00
	S.2.6.2	Peningkatan Guru SD bersertifikasi	Persentase Guru SD bersertifikasi pendidik	23,86	25,00
	S.2.6.3	Peningkatan Guru SMP bersertifikasi	Persentase Guru SMP bersertifikasi pendidik	26,82	28,00



	S.2.6.4	Peningkatan mutu guru kelas SD	Jumlah Guru SD yang mengikuti pelatihan guru kelas	500	530
	S.2.6.5	Peningkatan mutu guru mata pelajaran SMP	Jumlah Guru SMP yang mengikuti pelatihan keahlian di bidang yang di ampu	440	600
	S.2.6.6	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah TK	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	10	159
	S.2.6.7	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah SD	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	51	162
	S.2.6.8	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah SMP	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	39	104
	S.2.6.9	Pembinaan Calon Kepala sekolah	Jumlah Guru yang memiliki sertifikat kepala sekolah	46	30
	S.2.64.10	Peningkatan mutu Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan keahlian	150	200
5.2.7	Mutu pengawas sekolah		Jumlah Pengawas yang memiliki sertifikat pengawas dan penilik sekolah	100	100
	S.2.7.1	Peningkatan Pengawas dan Penilik Sekolah yang bersertifikasi	Jumlah yang mengikuti diklat calon pengawas/peningkatan Kompetensi Pengawas	38	0
5.2.8	Publikasi dan Informasi Pendidikan Kota Batam		Tersedianya data informasi pendidikan	Ada	Ada
	5.2.8.1	Penyusunan Data dan Informasi Pendidikan Kota Batam	Tersedianya data pendidikan yang valid	Ada	Ada



S3	Penguatan tatakelola pelayanan pendidikan		Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien	100	100	
	S.3.1	Ketatalaksanaan pelayanan pendidikan daerah hinterland	Jumlah sekolah hinterland yang terlayani	66	66	
		S.3.1.1	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Belakang padang	Jumlah sekolah yang terlayani	20	20
		S.3.1.2	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Bulang	Jumlah sekolah yang terlayani	15	15
		S.3.1.3	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Galang	Jumlah sekolah yang terlayani	31	31
		S.3.2	Tata kelola perencanaan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan keuangan yang tepat waktu	100	100
		S.3.2.1	Peningkatan kualitas perencanaan program	Persentase dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu	100	100
		S.3.2.2	Peningkatan kualitas pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan	Persentase dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang selesai tepat waktu	100	100
		S.3.2.3	Tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase capaian pengelolaan realisasi keuangan tepat waktu sesuai dengan anggaran	100	100
				Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/ eksternal yang ditindak lanjuti	100	100



S.3.3	Tata kelola administrasi dan kepegawaian pada kantor dinas pendidikan		Persentase pelayanan administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti	100	100
			Persentase pengelolaan kepegawaian yang terlayani	100	100
	S.3.3.1	Kenaikan pangkat dan penghargaan	Persentase kenaikan pangkat dan penghargaan aparatur	100	100
	S.3.3.2	Disiplin aparatur	Persentase kehadiran tepat waktu aparatur kantor dinas pendidikan	100	100
	S.3.3.3	Pembinaan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	50	50
	S.3.3.4	Tindak Lanjut Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindak lanjuti	100	100
S4.	Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan		Tersedianya bantuan pendidikan yang efektif kepada masyarakat	675	779
	S.4.1	Bantuan Pendidikan Yang Efektif	Terlaksananya penyerahan bantuan pendidikan kepada masyarakat	100	100
	S.4.1.1	Sumber daya manusia kota batam yang kompeten dan berdaya saing	Jumlah masyarakat yang menerima beasiswa melalui jalur undangan di lima universitas negeri teratas	75	29
	S.4.1.2	Peserta didik batam yang kompeten dan berdaya saing	Jumlah peserta didik yang menerima beasiswa prestasi akademik di sekolah	600	750

Dari tabel diatas indikator Kinerja Utama (IKU) dikelompokkan untuk mengetahui berapa indikator yang termasuk dalam katagori sangat baik, baik, cukup dan katagori kurang.

- Terdapat 66 (Enam Puluh Enam) indikator dengan nilai $76 \leq 90$ dengan kategori **Tinggi**
- 4 (Empat) indikator tercapai dengan nilai kinerja $66 \leq 75$ dengan kategori **Sedang**.



- 2 (dua) indikator kinerja tercapai dengan nilai kinerja $51 \leq 65$ dengan kategori **Rendah.**
- 3 (Tiga) indikator kinerja tercapai dengan nilai kinerja ≤ 50 dengan kategori **Sangat Rendah.**

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan di tahun 2017 dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor **Kpts./419.1/DISDIK/1/2017** terdapat 6 Indikator Kinerja Utama sebagai sasaran kinerja dinas Pendidikan. Penetapan indikator kinerja tersebut merupakan sasaran program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Yang telah ditetapkan target capaiannya, sehingga akan dapat dibandingkan seberapa besar realisasi dari masing-masing indikator sasaran.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan informasi capaian target yang telah ditetapkan. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas sasaran/target kinerja seperti tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

Sasaran 1

Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini merupakan program strategis, sehingga di perlukan kegiatan untuk peningkatan APK PAUD. Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD untuk Tahun 2019 adalah 95,55 angka ini sudah Baik tetapi masih perlu peningkatan sampai diharapkan APK PAUD mencapai 100%, untuk itu perlu adanya peningkatan dan perhatian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.

Seperti yang tertera dalam tabel dibawah ini

Tabel 3. 2 Realisasi Sasaran Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019	
		T	R	T	R
Perluasan Akses Pendidikan Anak	APK PAUD	76	77	84,69	95,55

Usia Dini					
-----------	--	--	--	--	--

- Tingkat PAUD, Angka partisipasi kasar (APK) PAUD telah mencapai target. Pada Tahun 2019 capaian APK PAUD 95,55, melebihi capaian Tahun 2018 yaitu sebesar 77,00. Kenaikan capaian ditahun 2019 sebesar 18,55.

Sasaran 2

Mutu Layanan Pendidikan

Sasaran Mutu Layanan Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batam, dengan melakukan terobosan – terobosan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Pengembangan kurikulum
2. Kondisi layak guna Sarana dan prasarana
3. Ketersedian media Penunjang Pembelajaran
4. Peningkatan kualitas lulusan
5. Mutu tenaga pendidik dan kependidikan
6. Mutu pengawas sekolah

Tabel 3.3 Realisasi Sasaran Mutu Layanan Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019	
		T	R	T	R
Mutu Layanan Pendidikan	Persentase sekolah PAUD berakreditasi minimal B				
	PAUD	41,35	41,35	48,00	45,68
	SD	56,00	56,00	64,00	68,00
	SMP	67,00	67,00	71,00	71,02

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tingkat PAUD, Persentase sekolah berakreditasi minimal B belum mencapai target. Pada Tahun 2019 capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B adalah 45,68

melebihi capaian Tahun 2018 yaitu sebesar 41,35. Kenaikan capaian ditahun 2019 sebesar 4,33.

- Tingkat SD capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B ditahun 2019 sebesar 68,00, capaian ini melebihi target yaitu 64,00. Jika di dibandingkan dengan capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B ditahun 2018 sebesar 56,00 maka terjadi kenaikan sebesar 12,00.
- Tingkat SMP capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B ditahun 2019 sebesar 71,02, capaian ini melebihi target yaitu 71,00. Jika di dibandingkan dengan capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B ditahun 2018 sebesar 67,00 maka terjadi kenaikan sebesar 5,00.

Sasaran 3

Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan

Sasaran Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Dengan melakukan terobosan – terobosan sebagai berikut :

1. Ketatalaksanaan pelayanan pendidikan daerah hinterland
2. Tata kelola perencanaan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel
3. Tata kelola administrasi dan kepegawaian pada kantor dinas pendidikan

Tabel 3.4 Realisasi Sasaran Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019	
		T	T	T	R
Penguatan tatakelola pelayanan pendidikan	Jumlah sekolah hinterland yang terlayani	66	66	66	66
	Persentase penyelesaian tata kelola perencanaan dan keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100
	Persentase pelayanan administrasi pelayanan umum yang ditindak	100	100	100	100

	lanjuti				
--	---------	--	--	--	--

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal di daerah hinterland, perlu di tingkatkan kualitas pelayanan UPTD. Keberadaan UPTD membantu dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan di daerah. Jumlah sekolah yang terlayani untuk daerah hinterland tahun 2018 dan tahun 2019 tidak mengalami perubahan yaitu berjumlah 66 sekolah.
- Peningkatan kualitas Tata kelola perencanaan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel sangat di perlukan. Meningkatnya kualitas ini dapat di lihat dari persentase dokumen perencanaan, dokumen evaluasi dan pelaporan selesai dengan tepat waktu 100% baik di tahun 2018 dan tahun 2019.
- Peningkatan Tata kelola administrasi dan kepegawaian pada kantor dinas pendidikan sangat di perlukan. Meningkatnya kualitas ini dapat di lihat dari persentase penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu dan peningkatan disiplin aparatur dan pembinaan aparatur berjalan dengan baik.

Sasaran 4

Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan

Sasaran Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat untuk memajukan pendidikan dan peningkatan kualitas masyarakat melalui program pemberian bantuan pendidikan untuk masyarakat yang lulus di 5 universitas negeri melauai jalur undangan dan beasiswa bagi peserta didik berprestasi di satuan pendidikan negeri tingkat SD dan SMP sekota Batam. Dengan melakukan terobosan – terobosan sebagai berikut :

1. Bantuan Pendidikan bagi masyarakat yang lulus di lima universitas negeri
2. Beasiswa pendidikan bagi peserta didik berprestasi



Tabel 3.5 Realisasi Sasaran Kualitas Sumber daya masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019	
		T	T	T	R
Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan	Tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat	100	100	100	100

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pemberian bantuan pendidikan untuk masyarakat yang lulus Universitas Negeri mengalami peningkatan di setiap tahunnya di sesuaikan dengan jumlah masyarakat yang menerima. Untuk di tahun 2018 dan tahun 2019 bantuan pendidikan tersalurkan 100% hanya jumlah penerima mengalami penurunan yang disebabkan tidak lulus nya kualifikasi penerima bantuan yang salah satu syaratnya IPK minimal 3,5.
- Pemerintah Kota Batam memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berprestasi di bidang akademik berupa beasiswa pendidikan selama satu semester untuk tiga orang peserta didik di setiap satuan pendidikan negeri.

C. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran atas pencapaian target dalam kegiatan yang tertuang pada masing-masing indikator kegiatan secara rinci dapat dilihat pada data tabel terlampir. Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam sampai dengan akhir tahun anggaran adalah 99.71%. Adapun kegiatan-kegiatan yang berhasil mencapai target 100% adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Dan SMPN Kec. Galang
3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Dan SMPN Kec. Bulang
4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Dan SMPN Kec. Blk Padang
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Kec. Batam Kota, Kec Nongsa



6. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Kec. Sagulung, Kec. Sei Beduk
7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Kec. Batu Ampar, Kec. Bengkong, Kec. Lubuk Baja
8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Kec. Sekupang, Kec. Batu Aji
9. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK
10. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Belajar (SKB)
11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah
12. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tata Kelola Tenaga Kependidikan
13. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMP Negeri Batam (57 Sekolah)
14. Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)
15. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
16. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya
17. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya
18. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD
19. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Ruang Penunjang Sekolah SMP
20. Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP
21. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD
22. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP
23. Pengadaan Meubelair dan Filling Cabinet SD
24. Pengadaan Meubelair dan Filling Cabinet SMP
25. Belanja Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
26. Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK)
27. Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK AFIRMASI)
28. Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK)
29. Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK AFIRMASI)
30. Kegiatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK)
31. Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
32. Pembinaan Varia Pendidikan Kompetensi Akademik dan Non Akademik



33. Peningkatan Alat Media Penunjang Pembelajaran
34. Pembinaan dukungan ujian sekolah dan ujian nasional
35. Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan
36. Olympiade Sains SD/SMP
37. Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
38. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi
39. Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK
40. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB) TK/SPK
41. Pembinaan guru dan tenaga kependidikan SD/SMP
42. Pembinaan Guru dan Tendik dan Dikmas
43. Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas sekolah
44. Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP
45. Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah
46. Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan

Perkembangan keadaan fisik dan keuangan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan juga dipengaruhi oleh proses dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, prosedur pelelangan yang harus dipenuhi, biaya revisi anggaran kondisi alam terutama pada paket pekerjaan konstruksi.

D. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja Keuangan dipengaruhi oleh jumlah anggaran yang dialokasi dalam APBD Kota Batam untuk Bidang Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Persentase realisasi keuangan untuk seluruh kegiatan baik Belanja Langsung Belanja tidak Langsung OPD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam mencapai 93.21%. Yang teralokasi tersebut dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam untuk biaya operasional seluruh kegiatan yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2019.

Biaya operasional kegiatan tersebut terdiri dari belanja pegawai dalam bentuk honorarium, belanja barang jasa serta belanja modal. Pagu anggaran yang dialokasikan



ditetapkan pada Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 304.504.637.216,98 terealisasi sebesar Rp. 283.820.682.766,13.

Selain itu untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, Pemerintah juga melakukan penambahan alokasi anggaran melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian pembangunan bidang pendidikan diharapkan tetap terselenggara sesuai perencanaan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Batam.

Berikut disajikan tabel rincian realisasi anggaran tahun 2019.

Tabel 3.7 Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO	URAIAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Target Keuangan	276.907.629.410,41	99.88	304.504.637.216,98	99.87
2	Realisasi Keuangan	256.810.279.531,00	92.74	283.820.682.766,13	93.21

Sumber: Laporan keuangan Dinas Pendidikan

1. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai untuk Tahun 2019 sebesar Rp. 310.472.382.489,58 (Perda Perubahan APBD) dan terealisasi sebesar Rp. 300.247.255.671,00 atau 96.71% sehingga Belanja Pegawai yang tidak terealisasi sebesar Rp. 10.225.126.818,58 atau 3.29%. Jika dibandingkan Belanja Pegawai tahun 2018 sebesar Rp. 283.448.302.000,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 terjadi kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp. 27.024.080.489,58 atau 9,29%.

Jumlah anggaran dan realisasi belanja Pegawai tahun 2018 dan 2019 di Dinas Pendidikan Kota Batam disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017-2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran 2018	Jumlah Anggaran 2019
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	129.739.850.720,55	143.536.615.534,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok / Uang Representasi	101.968.863.930,00	110.990.521.302,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	10.846.565.379,90	11.444.186.497,00

5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	223.515.000,00	234.790.000,00
5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	9.119.038.529,45	8.821.431.000,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	1.080.076.500,00	1.476.105.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	6.419.046.378,00	6.225.150.780,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	80.989.933,80	327.324.785,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	1.755.069,40	1.777.626,00
5.1.1.01.009.	Iuran jaminan Kesehatan	-	3.138.074.838,00
5.1.1.01.023.	Iuran jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua	-	910.365.026,00
5.1.1.01.026.	Tambahan Penghasilan Guru	-	(33.111.320,00)
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	157.806.254.890,00	156.710.640.137,00
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	96.550.761.890,00	92.422.793.852,00
5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.728.000.000,00	729.000.000,00
5.1.1.02.007.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	59.527.493.000,00	63.558.846.285,00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan

2. Belanja Barang Jasa

Anggaran Belanja Barang Jasa untuk Tahun 2019 sebesar Rp. 204.028.762.886,02 (Perda Perubahan APBD). Jika dibandingkan Belanja Barang Jasa tahun 2018 sebesar Rp. 204.749.582.628,47 maka pada Tahun 2019 terjadi Penurunan Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 720.819.742,45.

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018-2019

Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2018	Realiasi 2019
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.507.053.144,89	195.183.320.434,75
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.037.120.684,27	15.053.673.998,13
5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.115.616.311,27	8.465.096.848,13
5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	611.706.800,00	785.925.940,00

5.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	406.452.000,00	412.593.000,00
5.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.411.754.023,00	3.656.997.590,00
5.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	173.177.000,00	167.466.480,00
5.1.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3.000.000,00	6.500.000,00
5.1.2.01.09.	Belanja Cenderamata	-	121.300.000,00
5.1.2.01.10.	Belanja Peralatan / Kebutuhan Rumah Tangga Pakai Habis	540.229.750,00	638.565.040,00
5.1.2.01.11.	Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis Lainnya	775.184.800,00	799.229.100,00
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.143.192.842,99	3.233.087.935,00
5.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.718.164.534,09	1.184.588.100,00
5.1.2.02.02.	Belanja bahan/Bibit Tanaman		93.562.000,00
5.1.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	340.239.140,00	314.641.579,00
5.1.2.02.07.	Belanja Perlengkapan Peserta	668.673.000,00	752.192.100,00
5.1.2.02.08.	Belanja Peralatan Olahraga	874.270.103,00	915.104.156,00
5.1.2.02.11.	Belanja Bahan dan Material Lainnya	541.846.065,90	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.433.234.651,42	18.586.815.366,00
5.1.2.03.01.	Belanja telepon	403.727.960,00	388.403.050,00
5.1.2.03.02.	Belanja air	822.150.566,00	895.473.359,00
5.1.2.03.03.	Belanja listrik	2.713.975.025,12	2.927.956.732,00
5.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	332.508.200,00	262.143.800,00
5.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.043.756.536,70	1.151.601.279,00
5.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	-	2.400.000,00
5.1.2.03.09.	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan	86.165.000,00	38.090.200,00
5.1.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	42.432.500,00	34.685.000,00
5.1.2.03.14.	Belanja Transportasi Udara	3.713.164,00	91.480.046,00



5.1.2.03.15.	Belanja Transportasi Air	1.482.151.489,00	706.681.200,00
5.1.2.03.16.	Belanja Transportasi Darat	13.502.654.210,60	11.887.264.700,00
5.1.2.03.17.	Belanja Jasa Adm Bank, Pajak Bank dan Koreksi Bank	-	2.000.000,00
5.1.2.03.19.	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	-	198.636.000,00
5.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.970.800.920,00	2.728.137.823,00
5.1.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.970.800.920,00	2.728.137.823,00
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.765.000,00	73.100.000,00
5.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.465.000,00	33.300.000,00
5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.300.000,00	39.800.000,00
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.072.315.718,61	10.612.566.253,00
5.1.2.06.01.	Belanja cetak	1.548.063.645,00	1.709.925.236,00
5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.524.252.073,61	8.902.641.017,00
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	169.400.000,00	949.437.500,00
5.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	-	4.000.000,00
5.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	144.000.000,00	919.812.500,00
5.1.2.07.06.	Belanja Sewa Lapangan Olahraga	25.400.000,00	25.625.000,00
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.037.788.000,00	1.732.041.100,00
5.1.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	44.900.000,00	-
5.1.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	1.651.688.000,00	1.620.231.100,00
5.1.2.08.04.	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang	2.400.000,00	111.810.000,00
5.1.2.08.05.	Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang	338.800.000,00	-
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.295.000,00	87.050.000,00
5.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	8.000.000,00	7.200.000,00
5.1.2.10.07.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor	500.000,00	60.750.000,00



5.1.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	8.795.000,00	19.100.000,00
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.291.916.726,00	3.395.442.267,00
5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	-	387.222.297,00
5.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	34.300.000,00
5.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	-	55.324.500,00
5.1.2.11.05.	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	3.287.816.726,00	2.918.595.470,00
5.1.2.11.07.	Belanja Konsumsi Lainnya	4.100.000,00	-
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	-	75.508.000,00
5.1.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	75.508.000,00
5.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	423.983.000,00	587.102.000,00
5.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	-	12.075.000,00
5.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	122.380.000,00	152.449.500,00
5.1.2.14.08.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	301.603.000,00	422.577.500,00
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	399.112.386,00	1.517.065.026,00
5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	157.550.000,00	939.338.158,00
5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	241.562.386,00	577.726.868,00
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.780.551.947,00	5.466.868.353,62
5.1.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Taman	500.204.100,00	478.511.885,00
5.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel	3.850.000,00	-
5.1.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	946.905.000,00	1.083.064.800,00
5.1.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	22.000.000,00	20.950.000,00
5.1.2.18.18.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	107.477.600,00	219.165.500,00
5.1.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	773.922.950,00	-
5.1.2.18.24.	Belanja Pemeliharaan Gedung Pendidikan dan Pelatihan	1.036.124.400,00	3.327.443.559,62



5.1.2.18.25.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.218.340.897,00	-
5.1.2.18.29.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon	163.527.000,00	327.732.609,00
5.1.2.18.35.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	4.900.000,00	10.000.000,00
5.1.2.18.42.	Belanja Pemeliharaan Program Aplikasi Lainnya	3.300.000,00	-
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	203.371.358,00	74.460.000,00
5.1.2.19.07.	Belanja Jasa Bidang Kesehatan	5.323.358,00	4.910.000,00
5.1.2.19.16.	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	198.048.000,00	69.550.000,00
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.950.000,00	41.065.000,00
5.1.2.23.04.	Belanja Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	19.950.000,00	41.065.000,00
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	120.543.627.317,60	124.880.405.061,00
5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.185.997.317,60	88.392.227.061,00
5.1.2.26.03.	Upah Buruh/Tenaga Kerja	61.800.000,00	144.000.000,00
5.1.2.26.05.	Uang Saku Peserta	141.330.000,00	46.500.000,00
5.1.2.26.08.	Insentif Guru	100.154.500.000,00	36.1471.900.000,00
5.1.2.26.13.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	155.778.000,00
5.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.422.808.600,00	155.778.000,00
5.1.2.27.03.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat...	2.422.808.600,00	2.760.316.000,00
5.1.2.30.	Honorarium Jasa Narasumber / Tenaga Ahli	1.369.306.993,00	2.680.165.852,00
5.1.2.30.01.	Honorarium Jasa Narasumber.	12.800.000,00	565.400.000,00
5.1.2.30.02.	Honorarium Jasa Tenaga Ahli	1.356.506.993,00	2.114.765.852,00
5.1.2.31.	Belanja Pajak, Retribusi dan Iuran Lainnya	356.555.000,00	150.712.900,00
5.1.2.31.03.	Belanja Pajak Daerah	4.391.300,00	7.363.900,00
5.1.2.31.04.	Belanja Retribusi Daerah	91.320.000,00	143.349.000,00
5.1.2.31.05.	Belanja Iuran Lainnya	260.843.700,00	-



5.1.2.33.	Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD	789.957.000,00	498.300.000,00
5.1.2.33.01.	Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD.	789.957.000,00	498.300.000,00
5.1.2.34.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	-	58.037.213.052,58
5.1.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS.	-	58.037.213.052,58
5.1.5.	Belanja Hibah	976.737.333,00	1.820.357.415,21
5.1.5.04.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	976.737.333,00	1.820.357.415,21
5.1.5.04.01.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	976.737.333,00	1.820.357.415,21

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan tahun 2019

3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 tahun. Berdasarkan laporan keuangan, anggaran belanja modal tahun 2019 sebesar Rp. 99.947.608.319,75. Jika dibandingkan dengan Belanja modal tahun 2018 sebesar Rp. 65.036.135.020,33 maka terjadi kenaikan belanja modal sebesar Rp. 34.911.473.299,00.

Tabel 3.10 Realisasi Belanja Modal 2019

Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2018	Realiasi 2019
5.2.	Belanja Modal	65.036.135.020,33	86.817.004.916,17
5.2.2	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Bantu	-	19.828.697.824,00
5.2.2.03.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	-	2.288.000,00
5.2.2.03.04.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	-	2.288.000,00
5.2.2.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	98.800.000,00	166.200.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	98.800.000,00	166.200.000,00
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.159.397.975,00	1.389.381.350,00
5.2.2.14.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	-	1.000.000,00

5.2.2.14.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	23.000.000,00	-
5.2.2.14.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	66.150.000,00	71.714.350,00
5.2.2.14.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.070.247.975,00	1.136.667.000,00
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.740.071.865,00	6.440.756.041,00
5.2.2.15.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	6.754.001.450,00	4.650.982.705,00
5.2.2.15.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	21.650.000,00	42.000.000,00
5.2.2.15.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	536.506.000,00	201.743.800,00
5.2.2.15.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.421.774.415,00	1.523.009.536,00
5.2.2.15.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	6.140.000,00	23.020.000,00
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.015.221.250,00	8.322.800.033,00
5.2.2.16.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	147.500.000,00	2.580.783.010,00
5.2.2.16.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.816.346.250,00	5.297.770.023,00
5.2.2.16.05.	Belanja modal Pengadaan Perlatan Jaringan	51.375.000,00	449.247.000,00
5.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	691.783.000,00	514.098.000,00
5.2.2.18.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	400.815.000,00	360.738.000,00
5.2.2.18.07.	Belanja Modal Peralatan CCTV	290.968.000,00	153.360.000,00
5.2.2.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	4.400.000,00	3.355.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.400.000,00	3.655.000,00
5.2.2.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.894.766.700,00	2.989.519.400,00
5.2.2.24.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/KeterampiBelanalan Lain-lain	3.769.718.700,00	2.270.564.400,00
05.2.2.24.14.	Belanja Alat Peraga Edukatif	125.048.000,00	718.955.000,00
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.310.408.742,00	41.029.431.248,47
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.310.408.742,00	41.029.431.248,47
5.2.3.01.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	29.332.574.892,00	46.775.582.214,47



5.2.3.01.31.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pagar Pengaman	769.714.850,00	1.253.849.034,00
5.2.3.01.33.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.208.119.000,00	-
5.2.4.	Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan	213.766.000,00	1.234.782.882,70
5.2.4.01.	Belanja modal Pengadaan Jalan	213.766.000,00	98.825.500,00
5.2.4.01.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	213.766.000,00	98.825.500,00
5.2.4.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pangaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	1.135.957.382,70
5.2.4.06.07.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengaman	-	1.135.957.382,70
5.2.4.11.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	-	-
5.2.4.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air	-	-
5.2.4.16.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-
5.2.4.16.04.	Belanja odal Pengadaan Instalasi Listrik	-	-
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.907.519.488,33	17.724.092.961,00
5.2.5.01.	Belanja modal Pengadaan Buku	15.711.011.087,54	16.408.983.461,00
5.2.5.01.01.	Belanja modal Pengadaan Umum	518.820.700,00	9.501.036.368,00
5.2.5.01.03.	Belanja modal Pengadaan Agama	41.232.300,00	307.506.800,00
5.2.5.01.05.	Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa	90.489.400,00	452.425.900,00
5.2.5.01.06.	Belanja modal Pengadaan Matematika & Pengetahuan alam	112.078.300,00	1.527.725.950,00
5.2.5.01.09.	Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	-	20.336.700,00
5.2.5.01.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika	29.569.900,00	1.200.000,00
5.2.5.01.12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi	30.903.600,00	1.044.000,00
5.2.5.01.15.	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	49.517.600,00	257.909.800,00
5.2.5.01.16.	Belanja modal buku ilmu pengetahuan sosial	44.202.400,00	361.248.225,00
5.2.5.01.17.	Belanja modal buku ilmu pengetahuan dan teknologi	34.744.800,00	100.883.550,00
5.2.5.01.18.	Belanja modal buku ensiklopedia	1.031.131.000,00	-

5.2.5.01.19.	Belanja modal buku kamus bahasa	3.400.000,00	55.068.000,00
5.2.5.01.20.	Belanja Modal Buku Ekonomi dan Keuangan	-	4.488.000,00
5.2.5.01.22.	Belanja Modal buku Peraturan Perundang - undangan	-	9.283.300,00
5.2.5.01.23.	Belanja modal buku naskah	236.240.346,00	457.654.800,00
5.2.5.01.24.	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya	13.488.680.741,54	3.351.172.068,00
5.2.5.03.	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	827.463.900,79	164.821.700,00
5.2.5.03.01.	Belanja modal Pengadaan Peta	827.463.900,79	164.821.700,00
5.2.5.04.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	369.044.500,00	1.150.287.800,00
5.2.5.04.02.	Belanja Modal Pengadaan Lukisan	-	41.451.800,00
5.2.5.04.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	-	924.936.000,00
5.2.5.04.10.	Belanja Modal Ukiran	-	6.315.000,00
5.2.5.04.12.	Belanja Modal Peralatan Marching Band	109.600.000,00	177.585.000,00
5.2.5.04.13.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan Lainnya	259.444.500,00	-
5.2.5.09.	Belanja Modal BOS	-	-
5.2.5.09.01	Belanja Modal Dana BOS	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan tahun 2019



Bab 4

Penutup

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Batam adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, alat evaluasi kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai sasaran kinerja yang direncanakan secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Capaian kinerja secara fisik dapat direalisasikan 100 %.

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Batam disusun sebagai upaya untuk mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibidang Pendidikan untuk menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin handal, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap perkembangan di lingkungan masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai alat umpan balik manajemen yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas, pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di jajaran Dinas Pendidikan Kota Batam.



B. Tinjauan Khusus

LKjIP ini telah menyajikan sebagian dari perencanaan strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dengan berbagai kendala dan hambatan serta upaya-upaya pemecahan masalah yang ditempuh.

Pencapaian kinerja suatu instansi di lingkungan pemerintahan dapat dikatakan berhasil atau gagal dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing OPD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2016-2021 terdiri dari 4 Sasaran dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU).

C. Saran dan Tindak Lanjut

LKjIP di susun sebagai bahan laporan di tahun 2019 dan evaluasi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2020, agar perbaikan dilakukan secara terus menerus untuk perbaikan kualitas pelayanan pendidikan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Anggaran 2019, mudah-mudahan dapat memenuhi harapan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Amin

Batam, Januari 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Batam



HENDRI ARULAN, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19670719 199103 1 009

